

KESEIMBANGAN ANTARA HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DAN NORMA SOSIAL DALAM KEBIJAKAN PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI REMAJA

Putri Narendra Duhita Kusuma Wardhani¹, Budiarsih²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

putrinarendra.dkw@gmail.com¹, budiarsih@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT; *Reproductive health in adolescents has a very important role, but often experiences obstacles from social norms that limit their rights, especially in policies related to the provision of contraceptives. This research aims to assess the balance between adolescent reproductive health rights and the influence of social norms on these policies, by referring to Law no. 17 of 2023 concerning Health and PP no. 28 of 2024 as a guideline for implementation. This research uses a normative method with a legal approach and related concepts. The research results show that although Law no. 17 of 2023 concerning Health and PP no. 28 of 2024 has recognized the reproductive health rights of adolescents, policy implementation is still often hampered by prevailing social norms, which have an impact on access and use of contraceptives. This research highlights the importance of policies that are more adaptive to the socio-cultural context, as well as the need for more intensive educational programs to change public perceptions regarding adolescent reproductive health.*

Keywords: *Adolescent Reproductive Health, Contraceptive Devices, Health Policy.*

ABSTRAK; Kesehatan reproduksi pada remaja memiliki peran yang sangat penting, namun sering kali mengalami hambatan dari norma sosial yang membatasi hak-hak mereka, terutama dalam kebijakan terkait penyediaan alat kontrasepsi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai keseimbangan antara hak kesehatan reproduksi remaja dan pengaruh norma sosial terhadap kebijakan tersebut, dengan merujuk pada UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No. 28 Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang dan konsep-konsep terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No. 28 Tahun 2024 telah mengakui hak-hak kesehatan reproduksi remaja, implementasi kebijakan masih sering terganjal oleh norma sosial yang berlaku, yang berdampak pada akses dan penggunaan alat kontrasepsi. Penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan yang lebih adaptif terhadap konteks sosial budaya, serta perlunya program edukasi yang lebih intensif untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai kesehatan reproduksi remaja.

Kata Kunci: Kesehatan Reproduksi Remaja, Alat Kontrasepsi, Kebijakan Kesehatan.

PENDAHULUAN

Kesehatan reproduksi remaja memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas hidup dan masa depan generasi muda. Di Indonesia, isu ini semakin mendesak, terutama dengan meningkatnya jumlah remaja yang berpotensi mengalami masalah kesehatan reproduksi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaporkan bahwa sekitar 15 juta remaja berisiko menghadapi isu kesehatan reproduksi, termasuk masalah serius seperti kehamilan yang tidak direncanakan dan infeksi menular seksual (IMS).¹ Dampak dari masalah ini tidak hanya memengaruhi aspek fisik tetapi juga berimbas besar pada perkembangan psikologis dan sosial remaja. Oleh karena itu, tindakan pencegahan dan penguatan pendidikan kesehatan reproduksi menjadi sesuatu yang sangat penting.

Untuk mengatasi tantangan ini, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah disahkan dengan tujuan memperluas akses layanan kesehatan bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk remaja. Undang-undang ini menekankan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan berfokus pada hak-hak kesehatan reproduksi. Pengetahuan yang baik mengenai kesehatan reproduksi dapat membantu remaja memahami berbagai risiko yang mungkin dihadapi serta tindakan pencegahan yang perlu dilakukan untuk menghindari masalah kesehatan yang lebih serius di masa depan. Dengan adanya informasi yang cukup, remaja diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih baik mengenai kesehatan mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup mereka.

PP No. 28 Tahun 2024 yang diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap pendidikan kesehatan reproduksi dan alat kontrasepsi bagi remaja. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan informasi menyeluruh tentang kesehatan reproduksi, termasuk penyediaan alat kontrasepsi. Namun, norma sosial di masyarakat seringkali bertentangan dengan hak-hak kesehatan reproduksi remaja. Diskusi mengenai seksualitas di Indonesia sering dianggap tabu, sehingga banyak remaja kesulitan

¹ Andhika Ajie Baskoro and Sari Kistiana, "Apa Saja Isu-Isu Seksualitas Yang Dihadapi Anak Muda Indonesia?," *The Conversation*, 2024, <https://theconversation.com/apa-saja-isu-isu-seksualitas-yang-dihadapi-anak-muda-indonesia-220474>.

memperoleh informasi yang akurat tentang kesehatan reproduksi dan pilihan kontrasepsi yang tersedia.²

Penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja di Indonesia menjadi isu yang penuh perdebatan. Walaupun pemerintah berusaha untuk meningkatkan akses terhadap alat kontrasepsi, stigma sosial sering kali menghalangi remaja untuk memanfaatkan layanan tersebut. Banyak remaja merasa malu atau takut untuk meminta alat kontrasepsi karena khawatir akan mendapat penilaian negatif dari orang lain. Rasa malu ini dapat mengakibatkan remaja tidak mendapatkan alat kontrasepsi yang mereka butuhkan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan penularan infeksi menular seksual (IMS). Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan alat kontrasepsi, tetapi juga mencakup pendidikan yang memadai serta pemahaman tentang hak-hak kesehatan reproduksi.

Kesenjangan antara kebutuhan remaja akan informasi dan layanan kesehatan reproduksi dengan realitas yang ada di lapangan menjadi tantangan besar bagi kebijakan publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu menjembatani kesenjangan ini, sehingga remaja dapat dengan mudah mengakses informasi dan layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Pendidikan mengenai hak-hak kesehatan reproduksi harus menjadi prioritas dalam upaya pencegahan masalah kesehatan serius di kalangan remaja. Kesehatan reproduksi tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku remaja, sehingga kebijakan harus dihadirkan dengan pendekatan yang menyeluruh dan integratif.³

Untuk meningkatkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja, sangat diperlukan keterlibatan berbagai pihak. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi remaja.⁴ Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan remaja dapat tercipta. Upaya ini meliputi penghapusan

² Rismaina Putri et al., "Literature Review Pengaruh Komunikasi Antara Orang Tua Dan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Terhadap Perilaku Seksual Remaja" *Jurnal MID-Z (Midwifery Zigot) Jurnal Ilmiah Kebidanan* 4, no. 2 (2021): 52–66, <https://doi.org/10.56013/jurnalmidz.v4i2.1232>.

³ Siska Desta Roza, *Kesehatan Reproduksi: Perspektif Klinis Dan Sosial* (Bandung: Kaizen Media Publishing, 2024).

⁴ Silvia Tri Maharani Maharani and Emy Kholifah, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 4, no. 6 (2024): 11–20.

stigma seputar penggunaan alat kontrasepsi serta pendidikan masyarakat mengenai pentingnya kesehatan reproduksi bagi remaja.

Pengurangan stigma dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi serta pentingnya akses terhadap alat kontrasepsi. Adalah penting untuk melibatkan masyarakat dalam dialog dan memberikan pemahaman bahwa kesehatan reproduksi adalah komponen penting dari kesehatan secara keseluruhan. Pendidikan menyeluruh tentang kesehatan reproduksi di lingkungan sekolah juga sangat krusial untuk memberikan informasi dasar kepada remaja mengenai risiko dan langkah-langkah pencegahan terhadap masalah kesehatan reproduksi. Dengan pendekatan tersebut, remaja akan lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi.

Melibatkan remaja dalam proses pembuatan kebijakan adalah pendekatan yang sangat diperlukan. Mereka memiliki sudut pandang yang berharga mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi sehubungan dengan kesehatan reproduksi. Dengan mendengarkan pendapat mereka, kebijakan yang dibuat akan lebih tepat sasaran dan bermanfaat. Diskusi yang melibatkan remaja juga dapat membantu merumuskan solusi yang lebih sesuai dengan situasi yang mereka hadapi, sehingga kebijakan tersebut lebih mudah diterima dan diimplementasikan dengan baik.

Memperluas akses ke layanan kesehatan reproduksi tidak hanya menguntungkan remaja secara pribadi, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Remaja yang sehat dan memiliki pemahaman yang baik mengenai kesehatan reproduksi biasanya menikmati kualitas hidup yang lebih baik dan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk kemajuan masyarakat. Masyarakat yang memahami pentingnya kesehatan reproduksi remaja akan lebih menerima pendidikan dan penyuluhan yang berkaitan dengan topik ini. Oleh karena itu, kolaborasi dari semua pihak diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan reproduksi remaja.

Kebijakan yang baik tidak hanya mencakup penyediaan alat kontrasepsi, tetapi juga harus melibatkan pendidikan dan penghapusan stigma seputar kesehatan reproduksi.⁵ Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, kita dapat memastikan bahwa remaja memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan reproduksi yang mereka butuhkan. Hal ini merupakan

⁵ Vivii Angie and Triny Srihadiati, "Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11340–52.

bagian dari upaya untuk menjamin setiap remaja berhak hidup sehat, berkembang dengan baik, dan memiliki masa depan yang cerah. Setiap langkah yang diambil harus bertujuan untuk membangun generasi muda yang lebih sehat dan teredukasi.

Masalah kesehatan reproduksi di kalangan remaja membutuhkan perhatian dan tindakan cepat dari semua pihak. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan remaja dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap informasi dan layanan terkait kesehatan reproduksi. Peningkatan akses ini tidak hanya akan memperbaiki kualitas hidup mereka, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masa depan masyarakat secara keseluruhan. Upaya ini seharusnya dianggap sebagai investasi dalam kesehatan dan kesejahteraan generasi muda, yang pada akhirnya akan menghasilkan masa depan yang lebih sehat dan sejahtera bagi bangsa.

Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan penyuluhan, kita dapat menciptakan suasana yang mendukung serta mendorong remaja untuk memperoleh informasi yang mereka perlukan. Meningkatkan kualitas pendidikan tentang kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah, disertai dengan kampanye sosial yang proaktif, dapat membantu membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya akses terhadap alat kontrasepsi. Semua upaya ini diharapkan dapat mengurangi stigma yang ada dan memberikan peluang bagi remaja untuk tumbuh dengan baik.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode normatif. Terdapat juga dua pendekatan yang digunakan, yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan, yang berfokus pada analisis norma dan regulasi hukum yang ada dan yang kedua adalah pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk menggali dan memahami berbagai konsep hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.⁶ Melalui kedua pendekatan ini, penelitian ini berusaha memberikan wawasan yang menyeluruh mengenai masalah yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Kesehatan Reproduksi Remaja

Hak kesehatan reproduksi bagi remaja mencakup berbagai aspek penting yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan, keselamatan, dan perlindungan menyeluruh. Hak-hak ini tidak

⁶ Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, "Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023): 73–81.

hanya terbatas pada kesehatan fisik, tetapi juga mencakup kesejahteraan mental dan sosial.⁷ Salah satu komponen utamanya adalah hak untuk hidup dengan standar kesehatan yang layak. Remaja berhak menjalani kehidupan dengan aman, terbebas dari risiko kematian dini, infeksi menular seksual (IMS), dan risiko kesehatan akibat kehamilan di usia muda. Kehamilan remaja, khususnya saat tubuh mereka masih dalam tahap perkembangan, berpotensi menimbulkan masalah kesehatan serius. Hak ini bertujuan memastikan remaja tumbuh tanpa ancaman kondisi medis yang dapat dicegah melalui akses terhadap informasi dan layanan kesehatan yang memadai.

Remaja tidak hanya berhak untuk hidup dengan layak, tetapi juga berhak mendapatkan akses informasi dan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi. Penting bagi mereka untuk menerima informasi yang tepat dan sesuai dengan tahap usia mereka, sehingga dapat memahami tubuh mereka dan membuat pilihan yang cerdas. Pendidikan reproduksi yang baik seharusnya mencakup pengetahuan tentang anatomi tubuh, kesehatan seksual, serta cara untuk mencegah infeksi menular seksual (IMS) dan kehamilan yang tidak direncanakan. Dengan memiliki informasi yang akurat, remaja dapat lebih baik dalam menghindari risiko kesehatan dan menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Langkah ini juga berfungsi sebagai pencegahan agar mereka tidak terjebak dalam perilaku berisiko yang bisa merugikan kesehatan fisik dan mental mereka.

Hak untuk mendapatkan kesetaraan serta perlindungan dari diskriminasi merupakan bagian yang sangat penting dalam hak kesehatan reproduksi bagi remaja. Setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, atau latar belakang sosial-ekonomi, berhak untuk mendapatkan akses yang setara terhadap layanan kesehatan reproduksi. Meskipun demikian, kenyataannya, diskriminasi yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti gender, identitas seksual, atau status ekonomi sering kali menjadi penghalang bagi remaja dalam memperoleh layanan yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatasi isu diskriminasi ini agar setiap remaja dapat mendapatkan akses yang adil terhadap layanan kesehatan reproduksi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang pada akhirnya akan mendukung kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Selanjutnya, hak atas privasi dan kerahasiaan informasi merupakan aspek yang sangat penting dalam kesehatan reproduksi remaja. Hak ini mencakup perlindungan informasi pribadi

⁷ Rima Wirenviona and Anak Agung Istri Dalem Cinthya Riris, *Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020).

saat remaja menggunakan layanan kesehatan. Dengan adanya jaminan kerahasiaan, mereka akan merasa lebih nyaman dan berani untuk mencari bantuan atau berkonsultasi mengenai masalah kesehatan yang dihadapi. Selain itu, privasi juga meliputi kerahasiaan dalam konsultasi atau prosedur medis yang dijalani, sehingga remaja tidak perlu khawatir informasi tersebut diungkapkan kepada pihak yang tidak berwenang.

Di samping itu, hak untuk merencanakan masa depan reproduksi merupakan faktor yang sangat signifikan dalam kesehatan reproduksi remaja. Remaja berhak memilih waktu yang tepat untuk memulai reproduksi, termasuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak. Hak ini memungkinkan mereka untuk menjalani hidup sesuai dengan impian tanpa harus terbebani oleh kehamilan atau tanggung jawab keluarga yang belum mereka rasakan siap untuk dihadapi. Remaja yang memiliki kontrol atas masa depan reproduksi cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi karena dapat mengelola kesehatan reproduksi dan kehidupan mereka dengan lebih baik.

Hak untuk tidak mengalami segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan perdagangan manusia, merupakan bagian yang sangat penting dari hak kesehatan reproduksi bagi remaja. Pelanggaran seperti kekerasan seksual dan perdagangan manusia dapat memiliki dampak yang signifikan, merusak perkembangan fisik dan mental remaja. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan kepada remaja dari jenis kekerasan ini agar mereka dapat berkembang dalam lingkungan yang aman. Sebuah lingkungan yang aman dan mendukung adalah kunci untuk membantu remaja mencapai perkembangan yang optimal dan meningkatkan potensi serta kualitas hidup mereka.

Di samping hak-hak tersebut, hak untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan reproduksi yang aman dan berkualitas juga merupakan hak dasar. Remaja berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memanfaatkan teknologi serta praktik medis terkini, sehingga mereka terlindungi dari berbagai potensi risiko kesehatan. Ketersediaan tenaga medis yang terlatih dan fasilitas kesehatan yang memadai sangat penting untuk memenuhi hak ini. Sebagai contoh, remaja yang membutuhkan konseling atau bantuan medis harus dapat mengakses layanan tersebut tanpa menghadapi kendala biaya atau jarak.

Secara keseluruhan, berbagai aspek hak kesehatan reproduksi untuk remaja saling berhubungan dan berkontribusi dalam membangun lingkungan yang mendukung kesejahteraan mereka. Hak untuk mendapatkan hidup yang sehat, akses terhadap informasi yang tepat, kesetaraan dalam pelayanan, perlindungan privasi, dan kebebasan dari kekerasan

memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan remaja. Dengan memastikan pemenuhan hak-hak tersebut, remaja tidak hanya akan merasa lebih terlindungi, tetapi juga dapat mengendalikan kesehatan serta masa depan reproduksi mereka. Lingkungan yang mendukung kesehatan reproduksi memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mempersiapkan mereka menjadi individu yang bertanggung jawab dan mandiri di masa depan.

Pengaruh Norma Sosial terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja

Norma sosial berperan signifikan dalam memengaruhi kesehatan reproduksi remaja, terutama dalam aspek pemahaman, akses, dan perilaku terkait kesehatan seksual.⁸ Dalam berbagai komunitas, norma-norma tersebut sering mencerminkan pandangan masyarakat mengenai seksualitas. Hal ini dapat berdampak pada sikap serta tindakan remaja ketika menghadapi masalah kesehatan reproduksi. Dengan kata lain, pemahaman dan perilaku remaja terhadap kesehatan seksual sangat dipengaruhi oleh norma-norma yang ada di lingkungan sosial mereka.

Norma-norma sosial sering kali menimbulkan stigma dan tabu yang menghambat diskusi tentang seks serta kesehatan reproduksi. Di banyak budaya, seksualitas dianggap sebagai tema yang tidak pantas untuk dibicarakan, baik dalam lingkungan keluarga maupun di sekolah. Hal ini membuat remaja merasa malu atau tidak nyaman untuk membahas topik tersebut, bahkan dengan orang tua atau tenaga kesehatan. Ketidaknyamanan ini menciptakan jarak antara remaja dan informasi yang mereka perlukan. Akibatnya, mereka mungkin tidak mendapatkan pengetahuan yang memadai mengenai kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan cara berhubungan seksual yang aman. Minimnya informasi ini dapat menyebabkan perilaku berisiko, seperti melakukan hubungan seksual tanpa perlindungan, yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan infeksi menular seksual (IMS).

Stigma tersebut tidak hanya membuat remaja merasa terasing, tetapi juga dapat merusak rasa percaya diri mereka dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan kesehatan seksual. Contohnya, seorang remaja yang merasa tertekan untuk tidak membahas masalah seksual mungkin enggan mencari informasi yang diperlukan untuk melindungi diri mereka. Hal ini

⁸ Jein Chelli Yohanis and Eko Winarti, "Tinjauan Perilaku Kesehatan Remaja Dalam Konteks Kesehatan Reproduksi: Sebuah Analisis Literatur," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 5, no. 1 (2024): 634–42.

menciptakan siklus ketidaktahuan dan ketidakpahaman yang berlanjut, yang dapat mengakibatkan konsekuensi lebih serius di kemudian hari.

Kedua, norma sosial juga memengaruhi kemampuan remaja untuk mengakses layanan kesehatan reproduksi. Dalam masyarakat yang konservatif, penggunaan kontrasepsi sering kali dipandang negatif, sehingga remaja merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan pandangan tersebut. Mereka bisa saja ragu untuk mencari layanan kesehatan yang berhubungan dengan reproduksi, seperti konseling dan kontrasepsi. Ketidakmampuan untuk mendapatkan akses ke layanan ini dapat berimbas serius pada kesehatan fisik dan mental remaja. Misalnya, remaja yang ingin berkonsultasi mengenai masalah kesehatan reproduksi mungkin menghindari layanan medis karena takut dihakimi atau diberi label negatif oleh masyarakat.

Kondisi ini tidak hanya membatasi akses mereka ke informasi yang dibutuhkan, tetapi juga menghalangi mereka untuk menerima perawatan medis yang mungkin diperlukan. Dalam beberapa kasus, remaja bahkan merasa harus menyelesaikan masalah kesehatan reproduksi mereka sendiri tanpa bantuan profesional. Ketidakmampuan untuk mengakses layanan yang diperlukan ini dapat menyebabkan peningkatan tingkat kehamilan yang tidak diinginkan dan infeksi menular seksual di kalangan remaja.

Ketiga, norma sosial dapat menghambat pendidikan seks yang diberikan kepada remaja di sekolah. Banyak sistem pendidikan enggan membahas topik yang berhubungan dengan seksualitas karena khawatir terhadap norma yang ada. Akibatnya, remaja tidak menerima pendidikan yang komprehensif dan akurat mengenai kesehatan reproduksi, yang memperburuk ketidaktahuan dan kesalahpahaman mereka terkait isu-isu seksual. Ketidakmampuan untuk membahas topik ini dalam konteks pendidikan membuat remaja tidak siap menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan seks yang tidak memadai berkontribusi pada penyebaran informasi yang keliru yang dapat berbahaya.⁹ Sebagai contoh, jika pendidikan seks hanya mencakup aspek biologis dan mengabaikan aspek emosional serta sosial, remaja mungkin tidak memahami pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan. Oleh karena itu, mereka mungkin menghadapi kesulitan saat berhadapan dengan situasi yang melibatkan pilihan seksual. Hal ini

⁹ Mazroatun Nisrin et al., "Pendidikan Seksual: Kebutuhan Mendesak Di Tengah Perkembangan Teknologi Dan Informasi," *PROGRESIF* 2, no. 2 (2024): 44-53.

menunjukkan pentingnya pendidikan seks yang inklusif dan berbasis fakta dalam membantu remaja memahami kesehatan reproduksi secara menyeluruh.

Keempat, untuk mengurangi dampak negatif norma sosial terhadap kesehatan reproduksi remaja, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung diskusi terbuka mengenai isu-isu tersebut. Upaya pendidikan yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan perlu diperkuat agar remaja dapat mengakses informasi yang akurat dan membuat pilihan yang lebih baik terkait kesehatan reproduksi mereka. Diskusi terbuka ini juga dapat membantu meruntuhkan stigma yang ada, sehingga remaja merasa lebih nyaman dalam membahas masalah kesehatan seksual.

Keluarga memegang peranan penting dalam membicarakan masalah kesehatan reproduksi dengan anak-anak mereka. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk didorong agar dapat mengadakan diskusi yang jujur dan terbuka mengenai hal ini. Ketika orang tua merasa nyaman untuk membicarakan kesehatan reproduksi, remaja akan lebih merasa aman dan terdorong untuk mengajukan pertanyaan serta mencari informasi yang mereka perlukan. Interaksi yang positif dalam keluarga dapat membantu mengurangi stigma yang ada terkait dengan isu ini, sehingga menciptakan suasana yang mendukung bagi remaja untuk lebih memahami kesehatan reproduksi.

Kelima, masyarakat memainkan peranan yang penting dalam membentuk lingkungan yang mendukung. Upaya kampanye kesadaran yang dirancang untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi dapat membantu mengubah persepsi dan sikap terhadap isu-isu tersebut. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan seksual, stigma yang menyelimuti topik ini dapat berkurang. Lingkungan yang lebih terbuka dan mendukung dari masyarakat akan menciptakan ruang yang lebih aman bagi remaja untuk berdiskusi dan mengakses informasi terkait kesehatan reproduksi.

Keenam, keterlibatan remaja dalam proses pendidikan sangatlah penting. Mereka dapat menjadi agen perubahan di komunitas mereka dengan memberikan informasi kepada teman-teman sebaya tentang kesehatan reproduksi. Program pendidikan sebaya ini berperan dalam menyebarkan informasi yang benar dan relevan, serta menyediakan kesempatan bagi remaja untuk berbagi pengalaman dan kekhawatiran mereka. Saat remaja merasa memiliki kekuatan untuk berdialog tentang kesehatan seksual, mereka akan lebih cenderung untuk mengambil langkah yang benar dalam merawat kesehatan reproduksi mereka.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dampak negatif dari norma sosial terhadap kesehatan reproduksi remaja dapat diminimalkan. Hal ini penting untuk menciptakan generasi remaja yang tidak hanya memiliki pengetahuan yang cukup tentang kesehatan reproduksi tetapi juga merasa nyaman untuk berdiskusi dan mencari bantuan ketika diperlukan.¹⁰ Dengan dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan, remaja akan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi mereka.

Tantangan dalam Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Remaja

a. Kekhawatiran Terkait Penyalahgunaan Alat Kontrasepsi

Salah satu tantangan utama dalam kebijakan penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja adalah adanya risiko penyalahgunaan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai penggunaan dan potensi risiko alat tersebut. Ketika remaja tidak memperoleh edukasi yang memadai, mereka mungkin menggunakan alat kontrasepsi dengan cara yang kurang sesuai, yang dapat memicu perilaku seksual tanpa pertimbangan yang matang. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko infeksi menular seksual (IMS) serta kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu, minimnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi membuat remaja lebih rentan terhadap efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi tanpa arahan yang tepat.¹¹ Penggunaan yang tidak sesuai bisa berdampak pada kesehatan fisik mereka, terutama karena beberapa alat kontrasepsi memiliki efek hormonal atau membutuhkan cara penggunaan tertentu untuk hasil yang aman dan efektif. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk menyediakan pendidikan yang menyeluruh mengenai kesehatan reproduksi. Edukasi ini perlu mencakup cara penggunaan alat kontrasepsi yang tepat, risiko yang mungkin timbul, serta tanggung jawab yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya. Dengan adanya pendidikan yang efektif, diharapkan remaja dapat menggunakan alat kontrasepsi dengan bijaksana dan menghindari dampak negatif yang mungkin muncul dari penggunaan yang kurang tepat.

¹⁰ Dadang Muhammad Hasyim, Yani Maidelwita, and Desty Endrawati Subroto, "Education and Counseling on Adolescent Reproductive Health in High School: Edukasi Dan Penyuluhan Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Di Sekolah Menengah Atas," *Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat* 1, no. 6 (2024): 190–99, <https://doi.org/10.61220/jsipakatau.v1i6.2429>.

¹¹ Delita Septialti, Zahroh Shaluhayah, and Bagoes Widjanarko, "Studi Eksplorasi Perilaku Seksual Berisiko Pada Remaja Jalanan Di Kota Semarang," *Majalah Kesehatan* 10, no. 1 (2023): 43–53.

b. Perselisihan Pendapat dan Nilai-Nilai Budaya

Kebijakan penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja di Indonesia seringkali menjadi topik perdebatan, karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat. Banyak kelompok melihat kebijakan ini sebagai suatu cara untuk mendorong perilaku seksual bebas di kalangan remaja, yang mereka anggap sebagai wujud liberalisme yang tidak sesuai dengan norma tradisional. Pandangan ini menimbulkan ketegangan antara kebutuhan untuk melindungi kesehatan reproduksi remaja dan upaya untuk mempertahankan norma sosial yang ada. Ketidakefahaman ini menghambat proses penerimaan dan implementasi kebijakan tersebut dalam masyarakat, di mana terdapat kekhawatiran bahwa penyediaan alat kontrasepsi dapat memicu perilaku yang dianggap menyimpang. Untuk menangani isu ini, diperlukan pendekatan yang lebih menghormati nilai-nilai budaya serta adanya dialog terbuka antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Dengan cara ini, perbedaan pandangan dapat diselesaikan untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik. Diskusi semacam ini memungkinkan agar kebijakan yang diimplementasikan tidak hanya memenuhi kebutuhan kesehatan remaja tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat.

c. Dampak Psikologis dan Emosional

Penerapan kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental mereka. Dalam fase perkembangan emosional yang belum sepenuhnya matang, remaja sering kali rentan terhadap berbagai masalah, seperti trauma, depresi, dan gangguan mental lainnya. Dampak psikologis ini umumnya disebabkan oleh tekanan sosial dan stigma yang dihadapi ketika menggunakan alat kontrasepsi, yang dapat menimbulkan perasaan terasing dan ketidaknyamanan, serta berpengaruh negatif terhadap kesehatan mental secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan bimbingan dan pendidikan yang tepat, sehingga remaja mampu memahami dan mengatasi potensi efek negatif yang mungkin timbul. Pendidikan yang efektif mengenai penggunaan alat kontrasepsi juga berperan dalam mengurangi stigma tersebut. Di samping itu, keberadaan layanan kesehatan mental dan dukungan emosional bagi remaja sangatlah penting. Dengan adanya dukungan ini, remaja diharapkan dapat lebih percaya diri dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kesehatan reproduksi mereka tanpa harus terbebani oleh masalah psikologis, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung kesehatan mental mereka.

d. Kurangnya Pendidikan Seksual yang Komprehensif

Pendidikan seksual yang menyeluruh memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung efektivitas kebijakan kesehatan reproduksi. Tujuan utama dari pendidikan ini adalah untuk memberikan wawasan mendalam kepada remaja mengenai aspek-aspek kesehatan reproduksi. Wawasan ini mencakup pengetahuan tentang berbagai elemen yang berkaitan dengan kesehatan serta dampak yang mungkin muncul dari pilihan yang diambil. Namun, di banyak tempat, pendidikan seksual sering kali tidak memadai atau bahkan tidak ada, yang menjadi masalah serius. Tanpa pemahaman yang baik, remaja dapat menghadapi konsekuensi emosional dan sosial yang merugikan, seperti kecemasan dan stigma. Oleh karena itu, sangat penting untuk memasukkan pendidikan seksual yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan remaja dalam kurikulum pendidikan formal. Dengan pendekatan ini, remaja akan lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan terkait kesehatan dan dapat membuat keputusan yang lebih baik. Pendidikan yang efektif tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membantu menciptakan generasi yang lebih sadar dan bertanggung jawab atas kesehatan mereka di masa depan, sehingga membangun masyarakat yang lebih sehat dan lebih baik.

e. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Tantangan terakhir yang harus diperhatikan adalah kesulitan dalam implementasi kebijakan itu sendiri. Pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan alat kontrasepsi memerlukan pemantauan dan evaluasi yang cermat untuk memastikan bahwa penggunaan alat kontrasepsi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Beberapa kritik menunjukkan bahwa diperlukan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat selama proses implementasi. Tanpa adanya evaluasi yang efektif, sulit untuk menentukan keberhasilan kebijakan ini serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk perbaikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat, dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan ini. Dengan demikian, tantangan dalam kebijakan penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja, yang mencakup kekhawatiran mengenai penyalahgunaan, perbedaan nilai budaya, dampak psikologis, kurangnya pendidikan seksual, dan hambatan dalam pelaksanaan, dapat diatasi melalui integrasi pendidikan yang mendalam serta dukungan dari berbagai pihak.

Pentingnya Keseimbangan antara Hak Kesehatan Reproduksi Remaja dan Norma Sosial

Keseimbangan antara hak kesehatan reproduksi remaja dan norma sosial adalah isu yang sangat signifikan dalam konteks perlindungan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan remaja. Isu ini menuntut perhatian serius karena remaja perlu memperoleh akses yang memadai terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi, sambil tetap mempertimbangkan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Keseimbangan ini menjadi penting karena remaja harus memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi, sambil mempertimbangkan norma-norma sosial yang berlaku. Untuk memahami urgensi keseimbangan ini, beberapa aspek berikut akan dibahas.

a. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hak atas kesehatan reproduksi merupakan aspek yang sangat penting dari hak asasi manusia yang seharusnya dihormati dan dilindungi. Hak ini berkaitan dengan hak-hak yang telah diakui secara internasional dan harus diberikan kepada setiap individu. Remaja berhak untuk memperoleh akses yang memadai terhadap informasi serta layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, termasuk penggunaan alat kontrasepsi. Dengan adanya akses yang sesuai, remaja dapat lebih baik dalam mengelola kesehatan reproduksi mereka. Perlindungan terhadap hak-hak ini adalah kunci untuk memastikan bahwa remaja tidak terhambat oleh norma sosial yang dapat menghalangi akses mereka. Contohnya, stigma dan diskriminasi sering kali menjadi penghalang bagi remaja untuk mendapatkan informasi dan layanan yang mereka perlukan. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk menjamin bahwa hak-hak remaja diakui dan dilindungi oleh hukum. Saat hak kesehatan reproduksi remaja dihargai, mereka akan merasa lebih berdaya dan mampu membuat keputusan yang cerdas mengenai kesehatan mereka, yang dapat membantu mengurangi risiko masalah kesehatan di masa depan.

b. Pencegahan Masalah Kesehatan

Memberikan remaja akses yang memadai terhadap alat kontrasepsi serta pendidikan kesehatan reproduksi adalah hal yang sangat penting untuk mengurangi risiko kesehatan, seperti kehamilan yang tidak direncanakan dan infeksi menular seksual. Penyediaan akses ini berfungsi sebagai langkah pencegahan yang signifikan dalam menjaga kesehatan remaja. Ketidakpahaman dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dapat mendorong

remaja untuk membuat keputusan yang merugikan terkait kesehatan mereka, yang menunjukkan perlunya pendidikan yang memadai. Namun, norma sosial yang sering dianggap tabu dalam mendiskusikan kesehatan reproduksi dapat menghalangi pemahaman remaja tentang pentingnya perlindungan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka mengenai isu kesehatan reproduksi. Sebagai ilustrasi, lembaga pendidikan dan layanan kesehatan seharusnya bekerja sama dalam memberikan pendidikan yang menyeluruh tentang kesehatan reproduksi. Program-program ini perlu mencakup informasi yang komprehensif mengenai alat kontrasepsi, risiko infeksi menular seksual, serta pentingnya menjaga kesehatan seksual dan reproduksi. Dengan pendekatan ini, remaja akan lebih siap untuk membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab mengenai kesehatan mereka.

c. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Menciptakan keseimbangan antara hak kesehatan reproduksi dan norma sosial memerlukan upaya edukasi yang konsisten dalam masyarakat. Pendidikan menjadi sarana yang krusial dalam membentuk pandangan masyarakat. Dengan pendidikan yang tepat, masyarakat dapat mengubah persepsi mereka mengenai kesehatan reproduksi remaja, yang pada gilirannya dapat mengurangi stigma dan diskriminasi. Oleh karena itu, pendekatan yang melibatkan kerjasama dari berbagai pihak sangatlah penting. Upaya ini sebaiknya melibatkan berbagai pihak, seperti sekolah, orang tua, dan komunitas. Sebagai contoh, program penyuluhan kesehatan reproduksi di sekolah dapat memberikan informasi penting bagi remaja untuk memahami hak dan kewajiban mereka. Selain itu, melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin agama juga sangat penting agar pesan mengenai kesehatan reproduksi disampaikan sesuai dengan norma dan nilai yang ada. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya akses layanan kesehatan bagi remaja, diharapkan stigma dapat berkurang, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih terbuka bagi mereka.

d. Pemberdayaan Remaja

Akses remaja terhadap layanan kesehatan reproduksi juga mencerminkan upaya untuk memberdayakan mereka dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait kesehatan dan

masa depan mereka.¹² Pemberdayaan ini tidak hanya penting untuk kesehatan, tetapi juga untuk pertumbuhan pribadi remaja. Pemberdayaan ini sangat penting untuk membangun kepercayaan diri remaja, agar mereka merasa mampu mengambil keputusan yang tepat terkait tubuh dan kehidupan seksual mereka. Misalnya, pendidikan kesehatan reproduksi yang berkualitas dapat membantu remaja memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan pentingnya menjaga diri. Program-program yang melibatkan remaja dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait kesehatan mereka juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kontrol atas kesehatan reproduksi mereka. Ketika remaja merasa berperan aktif dalam proses ini, mereka lebih mungkin untuk bertanggung jawab atas kesehatan mereka, yang pada akhirnya dapat mengurangi risiko masalah kesehatan yang mungkin muncul.

e. Perubahan Sosial yang Positif

Apabila hak-hak kesehatan reproduksi diakui dan dihargai, norma sosial yang bersifat diskriminatif dapat mengalami transformasi seiring berjalannya waktu. Proses ini adalah langkah yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih adil. Sebuah masyarakat yang terbuka dan menghargai hak-hak kesehatan reproduksi bagi remaja akan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, yang pada gilirannya mendukung kesehatan reproduksi mereka. Keberlanjutan perubahan ini memberikan manfaat yang besar, tidak hanya untuk remaja, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Dengan berkurangnya stigma terhadap kesehatan reproduksi, lebih banyak remaja merasa nyaman untuk mencari informasi dan akses layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Hal ini juga berpengaruh positif terhadap cara pandang masyarakat secara umum. Selain itu, perubahan sosial ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan remaja dan mendukung program-program yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan penerimaan terhadap hak-hak kesehatan reproduksi remaja akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif untuk semua orang.

f. Partisipasi Aktif dalam Kebijakan

Mengikutsertakan remaja dalam proses pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi merupakan langkah yang sangat berarti. Keterlibatan mereka dalam

¹² Iwan Riswandie and Hening Putri Maharani, "Dinamika Perlindungan Hukum Bagi Remaja Dalam Analisis Komparatif Hak Remaja, Anak, Dan Orang Dewasa Terhadap Kepentingan Khusus Dalam Sistem Hukum Nasional," *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 54–66.

proses pembuatan kebijakan akan memastikan bahwa kebutuhan mereka diperhatikan. Dengan berpartisipasi secara aktif, suara mereka akan didengar, dan kepentingan mereka akan terpenuhi. Dengan mempertimbangkan perspektif remaja, kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dan dapat diterapkan dengan baik. Mendengarkan pendapat serta pengalaman remaja akan membantu dalam merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi. Program konsultasi dan diskusi yang melibatkan remaja memberikan kontribusi yang besar dalam memberikan pemahaman kepada pembuat kebijakan tentang berbagai tantangan yang dialami oleh remaja dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi. Kebijakan yang mempertimbangkan sudut pandang remaja biasanya lebih efektif dalam menangani permasalahan yang ada dan dapat menghubungkan antara hak-hak kesehatan reproduksi dan norma sosial. Ketika remaja merasa terlibat dalam proses ini, mereka akan lebih terdorong untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia serta berkontribusi pada perubahan positif di masyarakat

KESIMPULAN DAN SARAN

Menciptakan keseimbangan antara hak-hak kesehatan reproduksi remaja dan norma-norma sosial dalam kebijakan penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan mereka. Hak kesehatan reproduksi mencakup akses yang tepat terhadap informasi dan layanan kontrasepsi, yang memungkinkan remaja untuk mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab mengenai kehidupan seksual mereka. Namun, norma sosial yang ada sering kali menjadi penghalang dalam akses tersebut, di mana penggunaan kontrasepsi oleh remaja sering dianggap tabu. Pandangan semacam ini menimbulkan tantangan besar dalam merumuskan kebijakan, sebab pendekatan yang terlalu longgar dapat menyebabkan penolakan dari masyarakat, sementara kebijakan yang terlalu ketat bisa mengabaikan hak-hak reproduksi remaja. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kebijakan yang seimbang dengan menyertakan pendidikan yang menyeluruh, guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan reproduksi remaja. Selain itu, pelaksanaan kebijakan harus mempertimbangkan hak-hak tersebut tanpa menciptakan konflik sosial. Dengan pendekatan yang seimbang ini, kebijakan dapat berfungsi sebagai jembatan untuk mendukung kesehatan reproduksi remaja, sekaligus menjaga harmoni dalam masyarakat. Hasilnya, generasi muda akan mendapatkan perlindungan yang berkelanjutan dalam konteks yang mendukung,

sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang positif dan produktif. Keseimbangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa remaja memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses informasi dan layanan kesehatan yang mereka butuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angie, Vivii, and Triny Srihadiati. "Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11340–52.
- Baskoro, Andhika Ajie, and Sari Kistiana. "Apa Saja Isu-Isu Seksualitas Yang Dihadapi Anak Muda Indonesia?" *The Conversation*, 2024. <https://theconversation.com/apa-saja-isu-isu-seksualitas-yang-dihadapi-anak-muda-indonesia-220474>.
- Hasyim, Dadang Muhammad, Yani Maidelwita, and Desty Endrawati Subroto. "Education and Counseling on Adolescent Reproductive Health in High School: Edukasi Dan Penyuluhan Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Di Sekolah Menengah Atas." *Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat* 1, no. 6 (2024): 190–99. <https://doi.org/10.61220/jsipakatau.v1i6.2429>.
- Maharani, Silvia Tri Maharani, and Emy Kholifah. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 4, no. 6 (2024): 11–20.
- Marune, Abraham Ethan Martupa Sahat. "Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023): 73–81.
- Nisrin, Mazroatul, Naylatus Surur, Ahmad Thohirin, and Sri Sundari. "Pendidikan Seksual: Kebutuhan Mendesak Di Tengah Perkembangan Teknologi Dan Informasi." *PROGRESIF* 2, no. 2 (2024): 44–53.
- Putri, Rismaina, Vira Sartika Devi, Era Nurisa, and Miftahul Jannah. "Literature Review Pengaruh Komunikasi Antara Orang Tua Dan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Terhadap Perilaku Seksual Remaja." *Jurnal MID-Z (Midwivery Zigot) Jurnal Ilmiah Kebidanan* 4, no. 2 (2021): 52–66. <https://doi.org/10.56013/jurnalmidz.v4i2.1232>.
- Riswandie, Iwan, and Hening Putri Maharani. "Dinamika Perlindungan Hukum Bagi Remaja Dalam Analisis Komparatif Hak Remaja, Anak, Dan Orang Dewasa Terhadap Kepentingan Khusus Dalam Sistem Hukum Nasional." *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 54–66.

- Roza, Siska Desta. *Kesehatan Reproduksi: Perspektif Klinis Dan Sosial*. Bandung: Kaizen Media Publishing, 2024.
- Septialti, Delita, Zahroh Shaluhiah, and Bagoes Widjanarko. “Studi Eksplorasi Perilaku Seksual Berisiko Pada Remaja Jalanan Di Kota Semarang.” *Majalah Kesehatan* 10, no. 1 (2023): 43–53.
- Wirenviona, Rima, and Anak Agung Istri Dalem Cinthya Riris. *Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Yohanis, Jein Chelli, and Eko Winarti. “Tinjauan Perilaku Kesehatan Remaja Dalam Konteks Kesehatan Reproduksi: Sebuah Analisis Literatur.” *Jurnal Kesehatan Tambusai* 5, no. 1 (2024): 634–42.